

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*

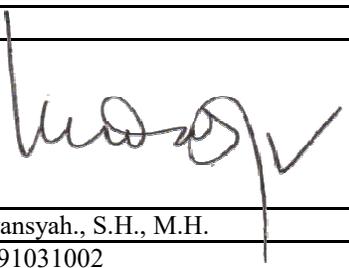
KARYA ILMIAH: Koran

18

Judul Karya Ilmiah (Artikel)	:	Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum
Jumlah penulis	:	1 Penulis
Status pengusul	:	Penulis 1
Identitas	a. Koran / Majalah	: Jawa Pos
	b. Tgl/thn terbit	: 10 Oktober 2020
	c. Vol., No., bln, thn	: 2020
	d. No. ISSN/ISBN	: -
Kategori Publikasi		Majalah Populer / Umum
	V	Koran

Hasil Penelitian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal		Nilai Akhir yang diperoleh
	Majalah, Maks: 1	Koran, Maks: 1	
		V	
a. Kelengkapan unsur artikel (10%)		0,1	0,08
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,3	0,28
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,3	0,28
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		0,3	0,28
Total = (100%)		1	0,92
Nilai Pengusul = 100% x 0,92 = 0,92			

Makassar :	17 September 2021
Reviewer 1 :	
Nama lengkap dan gelar :	Prof. Dr. Irwansyah., S.H., M.H.
NIP :	196610181991031002
Unit Kerja :	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Bidang Ilmu :	Hukum Lingkungan
Jabatan / Pangkat :	Guru Besar/ Pembina Utama Madya

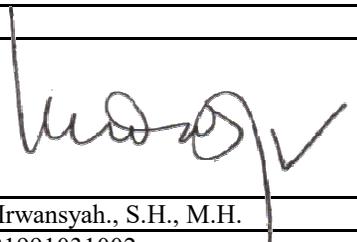
LEMBAR
HASIL PENELITIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: Koran

18

Judul Karya Ilmiah	: Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum
Nama Penulis	: Suparto Wijoyo

Komentar Peer Review :

Komponen yang dinilai	Komentar
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi:	Isi artikel sudah menjelaskan dan menggambarkan judul yang ditulis, yakni omnibus law yang merupakan ketidakpuasan khalayak ramai terhadap UU Cipta Kerja melalui konstusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Kemudian dasar teori yg digunakan yakni seperti perundang-undangan terkait dan argumen penulis yg cukup logis relasinya dengan tema yang sedang diangkat serta cukup mendalam.
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:	Artikel ini membahas pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang kontroversial merupakan manifestasi sempurna gerakan mendistorsi makna negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Khalayak ramai yang tidak puas terhadap UU Cipta Kerja melalui konstusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Gelombang protes atas regulasi yang berjubah omnibus law merupakan titik kulminasi yang dirancang secara implikatif akibat politik hukum yang mekanis. Omnibus law menjadikan rasa keadilan hukum dikerangkeng dalam space ketersendiriannya yang vakum, tidak bersentuhan dengan segmen kehidupan lainnya.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:	Adapun sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain buku teks, dan pendapat ahli. Bahan hukum dalam penulisan ini sudah selesai dengan studi literatur perundang-undangan Cipta Kerja yang kemudian dikaitkan dengan masalah, yang merupakan subjek penulisan.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit jurnal:	Kualitas, kredibilitas, dan kelengkapan unsur pada artikel ini cukup memadai, terlebih lagi karena diterbitkan oleh penerbit Jawa Pos yang telah menerbitkan koran sejak 1949.
5. Linieritas dan hubungan artikel dengan disertasi	Artikel ini tidak ada kaitan dengan naskah disertasi pengusul berjudul Fungsionalisasi Matarantai Pengaturan Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu Di Indonesia pada tahun 2003. Substansi dari artikel ini sesuai dan linier dengan keahlian penulis pada aspek hukum lingkungan.

Makassar :	17 September 2021
Reviewer 1 :	
Nama lengkap dan gelar :	Prof. Dr. Irwansyah., S.H., M.H.
NIP :	196610181991031002
Unit Kerja :	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Bidang Ilmu :	Hukum Lingkungan
Jabatan / Pangkat :	Guru Besar/ Pembina Utama Madya

LEMBAR
HASIL PENELITIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: Koran

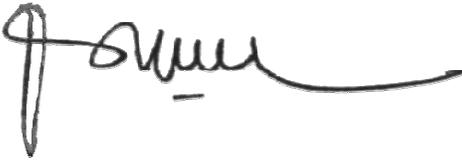
FORM 12

18

Judul Karya Ilmiah (Artikel)		: Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum
Jumlah penulis		: 1 Penulis
Status pengusul		: Penulis 1
Identitas	a. Koran / Majalah	: Jawa Pos
	b. Tgl/thn terbit	: 10 Oktober 2020
	c. Vol., No., bln, thn	: 2020
	d. No. ISSN/ISBN	: -
Kategori Publikasi		Majalah Populer / Umum
		V Koran

Hasil Penelitian *Peer Review* :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal		Nilai Akhir yang diperoleh
	Majalah, Maks: 1	Koran, Maks: 1	
		V	
a. Kelengkapan unsur artikel (10%)		0,1	0,1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		0,3	0,2
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		0,3	0,2
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)		0,3	0,25
Total = (100%)		1	0,75
Nilai Pengusul = 100% x 0,75 = 0,75			

Mataram :	20 September 2021
Reviewer 2 :	
	
Nama lengkap dan gelar :	Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum.
NIP :	196203231988031002
Unit Kerja :	Fakultas Hukum Universitas Mataram
Bidang Ilmu :	Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan
Jabatan / Pangkat :	Guru Besar/ Pembina Utama

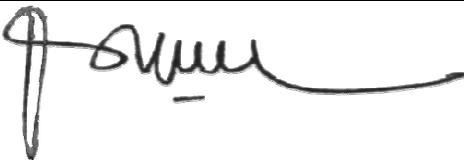
**LEMBAR
HASIL PENELITIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: Koran**

18

Judul Karya Ilmiah	: Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum
Nama Penulis	: Suparto Wijoyo

Komentar Peer Review :

Komponen yang dinilai	Komentar
1. Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi:	Isi pasal telah menjelaskan dan mencirikan judul yang ditulis, yaitu ketidaksenangan masyarakat umum terhadap UU Cipta Kerja melalui konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi. Landasan teoritis yang digunakan, seperti undang-undang terkait dan argumen penulis, yang sangat logis sehubungan dengan topik yang sedang dibahas dan cukup mendalam.
2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:	Artikel ini membahas pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial, yang merupakan perwujudan sempurna dari kecenderungan untuk memutarbalikkan pengertian negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Banyak pihak yang tidak senang dengan UU Cipta Kerja karena putusan MK tentang konstiusionalitasnya. Titik klimaks dari politik hukum mekanis adalah gelombang demonstrasi menentang peraturan yang terselubung dalam omnibus law. Omnibus legislasi menciptakan ilusi keadilan hukum yang terjebak dalam ruang hampa, terputus dari aspek kehidupan lainnya.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi:	Buku teks dan pendapat ahli digunakan sebagai sumber hukum sekunder dalam penulisan ini. Informasi hukum dalam makalah ini telah dilengkapi dengan tinjauan literatur tentang undang-undang penciptaan lapangan kerja, yang kemudian dikaitkan dengan topik yang dibahas.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit jurnal:	Kualitas, kredibilitas, dan kelengkapan unsur pada artikel ini cukup memadai, terlebih lagi karena diterbitkan oleh penerbit Jawa Pos yang telah menerbitkan koran sejak 1949.
5. Linieritas dan hubungan artikel dengan disertasi	Halaman ini tidak ada sangkut pautnya dengan disertasi pemrakarsa yang berjudul Fungsionalisasi Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Terpadu di Indonesia Tahun 2003. Pengetahuan penulis dalam aspek hukum lingkungan tampak pada isi makalah ini.

Mataram :	20 September 2021
Reviewer 2 :	
	
Nama lengkap dan gelar :	Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum.
NIP :	196203231988031002
Unit Kerja :	Fakultas Hukum Universitas Mataram
Bidang Ilmu :	Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan
Jabatan / Pangkat :	Guru Besar/ Pembina Utama

**HASIL VALIDASI DAN PENILAIAN
KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
(MEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH)**

A. Judul Karya Ilmiah : Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum
(Artikel)
Jumlah penulis : 1 orang
Status pengusul : Penulis ke 1 (mandiri)
Identitas Jurnal Ilmiah :
a. Koran/Majalah : Jawa Pos
b. Tgl./thn terbit : 10 Oktober 2020
c. Vol, No, bln, thn : 2020
b. No. ISSN/ISBN : -

B. Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Majalah Populer/ Umum
(beri tanda \checkmark pada kategori yang tepat) Koran

C. Hasil Validasi Ketua Departemen

Komponen yang dinilai		Reviewer I	Reviewer II	Nilai Rata Rata
a.	Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0,08	0,1	0,09
b.	Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0,28	0,2	0,24
c.	Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	0,28	0,2	0,24
d.	Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan (30%)	0,28	0,25	0,27
Total = (100%)		0,92	0,75	0,84
Nilai Pengusul =		100% X	0,84	= 0,84

D. Hasil Validasi Ketua Departemen

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan sampai pernyataan ini dibuat sebagai karya ilmiah **original / plagiat ***, sehingga kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun demikian, apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa karya ilmiah tersebut merupakan karya Ilmiah Plagiat, maka akan menjadi tanggung jawab mutlak penulis tersebut di atas, baik secara perdata maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

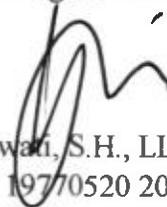
* Coret salah satu

Ketua Departemen Ilmu Hukum,



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 19800417 200501 1 005
Unit Kerja : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya,
Ketua Bagian Hukum Administrasi,



Indrawati, S.H., LL.M.
NIP. 19770520 200501 2 002
Unit Kerja : FH Universitas Airlangga